

**KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Oleh

Mirna Try Kurniawati

NIM. 05040421085



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirna Try Kurniawati
NIM : 05040421085
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Kedudukan Wakil Menteri Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Mei 2025

an,


Mirna Try Kurniawati
NIM. 05040421085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mirna Try Kurniawati

NIM : 05040421085

Judul : Kedudukan Wakil Menteri Dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 Mei 2025

Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin.S.H.I.,M.H.
NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mirna Try Kurniawati

NIM. : 05040421085

Judul : Kedudukan Wakil Menteri Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

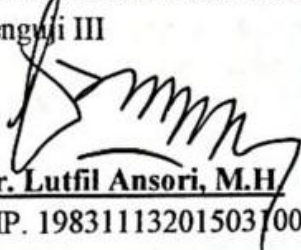
Penguji I



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

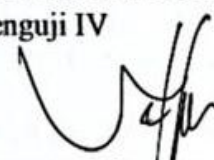
Penguji II



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 05 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 198303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mirna Try Kurniawati
NIM : 05090921085
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : Mirna.kurnia182@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kedudukan Wakil Menteri dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Juli 2025

Penulis


(Mirna Try K.)
Mirna Try Kurniawati

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan Wakil Menteri dalam struktur Kementerian Negara di Indonesia yang kurang jelas, terutama setelah pembaruan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan yang hanya menyebutkan tugas tanpa menjelaskan secara rinci tentang struktur dan kewenangan Wakil Menteri, serta perlunya pemahaman lebih dalam mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Penelitian ini juga mencakup teori *Fiqh Siyasah* dalam konteks pemerintahan Islam, dengan konsep *Wizārah/Wazīr* yang pada pemerintahan islam adalah sebutan bagi pembantu khalifah atau pemimpin negara. Dari latar belakang masalah yang ada munculah rumusan masalah yang ingin di kaji yaitu bagaimana kedudukan wakil Menteri yang ada di negara Indonesia ini, serta bagaimana kedudukan wakil Menteri berdasarkan prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* dengan konsep *Wizārah/Wazīr*.

Jenis metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan teknik studi kepustakaan, Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder untuk membahas kedudukan, tugas, dan wewenang Wakil Menteri, dengan penekanan pada pembaruan peraturan yang berhubungan dengan posisi tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih ambigu, dan hal ini berimbas pada tugas serta kewenangannya yang kurang diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Dari perspektif *Fiqh Siyasah*, Wakil Menteri memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan untuk kemaslahatan umat, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka hukum yang ada.

Sehingga saran dari penelitian ini adalah perlunya klarifikasi mengenai kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri melalui revisi undang-undang yang lebih spesifik, untuk memastikan fungsi dan tanggung jawabnya dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan negara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan akademisi untuk memperbaiki posisi Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia

DAFTAR ISI

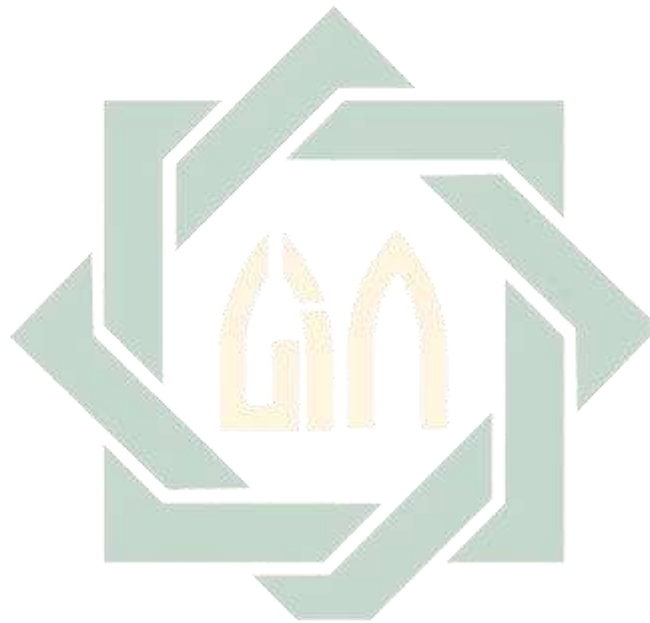
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KONSEP KEMENTERIAN DAN <i>WIZĀRAH/WAZĪR</i>.....	27
A. Konsep Kementerian	27
B. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	39
C. <i>Wizārah/Wazīr</i>	42
BAB III KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA	47
A. Perkembangan Jabatan Wakil Menteri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	47
B. Hak Prerogatif Presiden Sebagai Kewenangan Dalam Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri.....	53
C. Karakteristik Jabatan Wakil Menteri Di Indonesia	57

D. Tugas, Wewenang, dan Pertanggung jawaban Wakil Menteri.....	60
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA <i>PERSPEKTIF FIQH SIYASAH</i>	63
A. Analisis Yuridis Kedudukan Wakil Menteri Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	63
B. Analisis Kedudukan Wakil Menteri Dengan Konsep <i>Wazīr</i> Perspektif <i>Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah</i>	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kelompok Dan Fungsi Kementerian Negara Indonesia	30
Tabel 2 Jumlah Wakil Menteri Pada Tahun 2009-2025	66
Tabel 3 Jumlah posisi Wakil Menteri dalam kementerian Era Presiden Prabowo Subianto	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Adhayanto, Oksep, Eksistensi Hak Preogratif Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Amandemen Uud 1945, Tanjungpinang: Umrah Press, 2015.
- Pengantar Ilmu Asshiddiqie , Jimly, Hukum Tata Negara Jilid I, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, 2006.
- Khaeruman Achmad Ruslan. , *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Rangkas Education, 2011.
- Adha, Ahmad Faizal. “Kementerian (Al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam.” *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, No. 1 (January 25, 2022): 31.
- Adrian Riyoeada, Dkk, Anggia Putri Syarani, Cindy Aulia Rahma, Batu Bara, Helena Syifa Nst, And Risky Azhari Selian. “Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia.” *Journal Of Islamic Studies* 01, No. 01 (2023).
- Ahmad Siboy. “Desain Jalan Tengah Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Penyusunan Kabinet.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 1, No. 1 (2023): 972.
- Al Haq, Isa Anshori, And Siti Ngainnur Rohmah. “Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia.” *Mizan: Journal Of Islamic Law* 5, No. 2 (August 20, 2021): 261.
- Amin Rahmad Panjaitan, Irwansyah. “Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah.” *Unes Law Review* 6, No. 2 (December 2023).
- Andryan. “Efektifitas Wakil Menteri Negara Sebagai Pembantu Presiden Dalam Sistem Presidensial” 2, No. 1 (2024).
- Arifin, Firdaus. “Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tetang Kementerian Negara” 38, No. 1 (2024).
- Aziz Wahab. “Kedudukan Wazir (Kementerian) Menurut Imam Al- Mawardi.” Skripsi, Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024. Accessed February 19, 2025. <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/34329/1/Awal%20-%20bab%20ii%20dan%20daftar%20pustaka.Pdf>.
- Badri Khaeruman, And A. Muhtar Ghazal. “4 Pilar Wawasan Kebangsaan: Pancasila, Uud 1945, Nkri Dan Bhineka Tunggal Ika.” : *Lp2m Uin Sunan Gunung Djati Bandung* (January 2020).
- Benito Asdhie Kodiyat Ms, Candra Pulungan. “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, No. 1

(February 27, 2020). Accessed November 4, 2024.
[Http://Journal.Fhupb.Ac.Id/Index.Php/Jhmb/Article/View/18](http://Journal.Fhupb.Ac.Id/Index.Php/Jhmb/Article/View/18).

Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag, And Karel Yossi Umboh. “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia” 10, No. 5 (2022).
[Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V2/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/42825](https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V2/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/42825).

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Hasanah, Nur. “Analisis Hukum Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Terhadap Pengangkatan Menteri Kabinet.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah, 2021.

Hendri, Danny. “Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Hidayat, Syaiful. “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah.” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, No. 2 (December 1, 2013): 01–21.

Imam Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2010.

Johansyah. “Hak Prerogatif Presiden Menurut Uud 1945,” May 2018. Volume 16, Nomor 2,.

Khoiriyah, Siti Nurul. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Konsep Wizarah Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Laurensius Arliman S. “Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia” (2015).

Lembaga Pengembangan Dan Konsultasi Nasional. “Perbandingan Pemerintahan Teknokratik Vs. Pemerintahan Politik.” Artikel Pemerintahan. *Diklat Pemerintahan*, August 30, 2023. Accessed May 3, 2025. <https://Diklatpemerintah.Id/Perbandingan-Pemerintahan-Teknokratik-Vs-Pemerintahan-Politik/>.

M Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Iqbal,. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: Pt Nasya Expanding Management, 2019.

Muhammad Tamliho Harahap. “Konsep Kementerian Menurut Ibn Khaldūn Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2021.<https://Repository.ArRaniry.Ac.Id/Id/Eprint/18874/1/Muhammad%20tamliho%20harahap,%20150105082,%20fsh%Ef%80%A2htn,%20082277263759>.

- Nurcholis Madjid. , *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Octovina, Ribkha Annisa. “Sistem Presidensial Di Indonesia.” *Cosmogov* 4, No. 2 (October 30, 2018): 247.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahma Fuji Lestari. “Konsep Kementerian Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Wizarah Tafwidl.Pdf.” Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. Accessed February 19, 2025. <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Eprint/34685/1/Rahma%20fuji%20lestari,%20190105065,%20fsh,%20htn.Pdf>.
- Rahmawati. “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, No. 2 (December 5, 2018): 264–283.
- Ramadian, Pebi, And Meri Yarni. “Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri” 2, No. 3 (2022).
- Reza Kausar, And M. Gaussyah. “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 5 (2021).
- Ridwan Hr. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rosi Ade Febryan. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023. Accessed April 19, 2025. <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/23743/1/Pusat%20bab%201%20dan%202>.
- Samsu, La. “Al-Sult Ah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sult Ah Al-Tanfiz Iyyah, Al-Sult Ah Al-Qad Ā’iyyah” Vol. Xiii, No. 1, No. 1 (June 2017).
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Dz.” Alfabeta, Cv. Bandung, 2013.
- Tenrilawa, Dian Furqani, Sitti Mutmainnah Syam, And Muh Arfhani Ichsan Ah. “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia” 4, No. 2 (2021).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum. “Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir.” Uiniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Ulya, Zaki. “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945” 13 No 02 (2016).
- Yusdani,. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.